



Dari Perang ke Politik: Peran Strategis Chiang Kai Shek dalam Revolusi Xinhai dan Revolusi Kedua di Tiongkok

From Warfare to Politics: Chiang Kai Shek's Strategic Role in the Xinhai Revolution and the Second Revolution in China

Muhammad Naufal Nestahadi¹✉, Yuda Benharry Tangkilisan², R. Tuty Nur Mutia³

¹✉ ^{2,3} Universitas Indonesia

E-mail: nnestahadi@gmail.com✉, yebete@yahoo.com, tutymuas@gmail.com

Diterima: 18 November 2024 | Direvisi: 10 April 2025 | Diterbitkan: 30 April 2025

ARTICLE INFO

Keywords:

Chiang Kai Shek,
Kuomintang,
Xinhai Revolution,
Second Revolution,
Republic of China,
Qing Dynasty,
Yuan Shi Kai.

This study explores the strategic role of Chiang Kai Shek during two major revolutionary phases in China: the 1911 Xinhai Revolution, which ended the Qing Dynasty's rule, and the Second Revolution of 1913, which aimed to overthrow Yuan Shi Kai's regime. Born into a modest family in Zhejiang as the son of a salt merchant, Chiang Kai Shek pursued a military career in Baoding and Japan, eventually becoming one of the leading commanders within the Kuomintang under the mentorship of Sun Yat-sen. Using a historical method encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this study examines Chiang's contributions in building a modern military structure and organizing revolutionary forces. The findings suggest that Chiang played a critical role in the Zhejiang campaign of 1911 and remained steadfastly loyal to Sun Yat-sen during the Second Revolution, laying the groundwork for his future leadership of the Kuomintang and the Republic of China.

Kata Kunci:

Chiang Kai Shek,
Kuomintang,
Revolusi Xinhai,
Revolusi Kedua,
Republik Tiongkok,
Dinasti Qing,
Yuan Shi Kai.

Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis Chiang Kai Shek dalam dua fase revolusi besar di Tiongkok: Revolusi Xinhai 1911 yang mengakhiri kekuasaan Dinasti Qing, dan Revolusi Kedua 1913 yang bertujuan menggulingkan rezim Yuan Shikai. Chiang Kai Shek, anak seorang pedagang garam dari Zhejiang, menempuh pendidikan militer di Baoding dan Jepang sebelum menjadi salah satu komandan utama dalam Kuomintang di bawah bimbingan Sun Yat-sen. Dengan menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menelaah kontribusi Chiang dalam menegakkan struktur militer modern serta mengorganisasi kekuatan revolusioner pada masa transisi kekuasaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Chiang Kai Shek memainkan peran penting dalam kampanye militer merebut Zhejiang pada 1911 dan tetap setia kepada Sun Yat Sen dalam Revolusi Kedua, meski menghadapi tantangan internal dan eksternal yang besar. Peran dan pengorbanannya membentuk dasar bagi kepemimpinannya di masa depan dalam Kuomintang dan Republik Tiongkok.

memunculkan ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat Han. Kekalahan militer dan ketidakmampuan Qing dalam menghadapi intervensi asing dipandang sebagai bukti

PENDAHULUAN

Pemerintahan Dinasti Qing yang telah berlangsung selama lebih dari dua abad

kegagalan pemerintahan, sehingga mengikis kepercayaan rakyat. Invasi bangsa asing, pemberontakan petani, munculnya gerakan keagamaan seperti Taiping, korupsi birokrasi, serta bencana alam seperti banjir akibat meluapnya Sungai Kuning, dipahami dalam tradisi Tiongkok sebagai tanda bahwa sebuah dinasti telah kehilangan ‘Mandat dari Surga’ (Lary, 2006: 14).

Sepanjang 1850-an hingga 1890-an, Tiongkok mengalami serangkaian krisis internal dan eksternal yang mengguncang stabilitas kekuasaan Dinasti Qing. Campur tangan negara-negara asing seperti Inggris, Prancis, dan Rusia dalam urusan domestik melemahkan kedaulatan Tiongkok. Kekalahan Qing dalam berbagai perang memaksa mereka menandatangani perjanjian yang merugikan, yang kemudian dikenal sebagai *Unequal Treaties*, menandai awal dari periode yang disebut dalam historiografi Tiongkok sebagai *Century of Humiliation*.

Pandangan mengenai *Unequal Treaties* dan *Century of Humiliation* menjadi pemicu utama tumbuhnya nasionalisme di kalangan bangsa Han. Namun, elite Qing, termasuk Kaisar Daoguang (berkuasa 1820–1850), cenderung menganggap enteng ancaman dari kekuatan asing. Kekalahan dalam Perang Opium Pertama pada 1842 memaksa Qing menandatangani Perjanjian Nanjing, yang membuka lima pelabuhan—Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Shanghai, dan Guangzhou—bagi Inggris serta menyerahkan Hong Kong kepada mereka (Fenby, 2008: 10).

Pejabat Qing kerap meremehkan bangsa Barat, menggambarkan Inggris sebagai “ras tidak penting dan menjijikkan,” bahkan

menyamakannya dengan “anjing dan kuda.” Pandangan ini berakar pada keyakinan Qing sebagai Middle Kingdom yang dikelilingi negara-negara pembayar upeti (tributary states). Selama tidak ada pihak yang menantang Mandat dari Surga, keberadaan Eropa dianggap tak membahayakan. Sikap ini membuat Qing menyetujui pembukaan pelabuhan serta pemberian konsesi hukum di berbagai kota besar kepada kekuatan asing (Fenby, 2008: 10).

Kegagalan Qing dalam melakukan reformasi menyeluruh menjadi penyebab utama kekalahan dalam Perang Tiongkok–Jepang (1894–1895), yang memperdalam krisis internal. Sebagai respons, Kaisar Guangxu meluncurkan Reformasi Seratus Hari (11 Juni – 22 September 1898), yang bertujuan memperbarui sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan militer. Salah satu fokus utamanya adalah modernisasi militer dengan mengganti persenjataan tradisional dengan senjata modern, baik impor maupun hasil produksi dalam negeri (Fenby, 2008: 66; Jowett, 2013: 43).

Reformasi tersebut memicu kecurigaan di kalangan elite Qing, terutama Permaisuri Ci Xi, yang menilai perubahan itu terlalu radikal dan bertentangan dengan nilai-nilai Konfusianisme. Kudeta yang dibantu oleh Yuan Shi Kai menggagalkan reformasi ini, dan kekuasaan kembali ke tangan Ci Xi (Fenby, 2008: 73-74). Meskipun begitu, reformasi tersebut menjadi cikal bakal kebijakan baru yang diluncurkan beberapa tahun kemudian, yang bertujuan menyederhanakan birokrasi, memperluas pendidikan, memperbaiki infrastruktur, serta kembali memodernisasi militer.

Namun, kebijakan baru tersebut dinilai datang terlambat. Salah satu kelemahan utamanya

adalah desentralisasi kepemimpinan militer, yang menyebabkan tidak adanya otoritas tunggal dalam mengendalikan angkatan bersenjata. Hal ini melahirkan cikal bakal era warlordism (1911–1928), ketika para panglima perang lokal menguasai wilayah masing-masing dengan kekuatan militer sendiri (Powell, 1955: 99–101).

Dalam konteks inilah, Chiang Kai-shek mulai tampil sebagai figur signifikan dalam percaturan politik dan militer Tiongkok. Berbekal pendidikan militer di Jepang, ia berperan penting dalam mengorganisasi dan memodernisasi kekuatan militer Kuomintang serta dalam proses transisi dari kekuasaan Dinasti Qing menuju Republik Tiongkok.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara kritis peran strategis Chiang Kai Shek dalam dua fase revolusi besar di Tiongkok, yaitu Revolusi Xinhai 1911 dan Revolusi Kedua 1913. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis keterlibatan militernya dalam dua momen tersebut serta pada hubungan personal dan politiknya dengan Sun Yat Sen yang berpengaruh signifikan dalam pembentukan karakter kepemimpinannya. Dalam rangka menjawab persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan kunci, seperti bagaimana latar belakang pendidikan, kehidupan awal, dan lingkungan sosial membentuk pandangan serta karakter revolucioner Chiang Kai Shek; bagaimana strategi militer yang ia rancang dan perannya dalam menghadapi kekuatan Dinasti Qing serta Yuan Shi Kai; dan sejauh mana hubungan ideologis dan kepercayaan dari Sun Yat Sen membentuk posisi

Chiang Kai Shek dalam struktur Kuomintang pada masa revolusi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi secara kritis keterlibatan Chiang Kai Shek dalam dua revolusi tersebut, sembari menjelaskan dinamika kepemimpinan dan pengaruh jaringan relasi politik dalam pergulatan menuju republik modern. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami akar militerisme dan basis legitimasi politik dalam kepemimpinan Chiang Kai Shek sejak periode awal revolusi, yang kerap terpinggirkan dalam narasi besar sejarah Tiongkok modern. Dengan mengkaji fase awal perjuangannya, penelitian ini berupaya menyumbang perspektif historis yang lebih komprehensif terhadap formasi kekuatan Kuomintang dan pembentukan karakter negara pasca-Qing, sekaligus menanggapi perdebatan kontemporer mengenai warisan politik Chiang di Taiwan yang tetap menjadi medan pergesekan antara memori, kekuasaan, dan identitas nasional.

Sampai saat ini, Chiang Kai Shek masih menjadi perbincangan panas dalam dunia perpolitikan di Republik Tiongkok/Taiwan. Pandangan masyarakat Taiwan terpecah menjadi dua, pendukung Chiang Kai Shek yang sebagian besar adalah keturunan Tiongkok/Kuomintang dan anti-Chiang Kai Shek yang sebagian besar adalah pendukung DPP (Democratic Progressive Party). Masing-masing pendukung dan anti mengeluarkan argumen terhadap Chiang Kai Shek. Kelompok pendukung berargumen bahwa Chiang Kai Shek yang menjadikan Taiwan sebagai negara maju (The Contested Histories Initiative, 2022: 7). Sedangkan kelompok anti menilai bahwa Chiang

Kai Shek adalah simbol dari pemerintahan otoriter dan terikat dengan partai oposisi yang dekat dengan Republik Rakyat Tiongkok (Jen, 2024).

Kajian teoretis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori kepemimpinan militer, konsep revolusi sosial, dan teori relasi kuasa. Dalam konteks ini, teori kepemimpinan militer digunakan untuk menganalisis peran dan strategi militer Chiang Kai Shek dalam mengorganisasi kekuatan revolusioner serta dalam pengambilan keputusan strategis di medan perang. Menurut Laver dan Matthews (2008: 2), kepemimpinan yang efektif dapat dikembangkan melalui pengalaman praktis yang dipadukan dengan pembelajaran teoritis dan refleksi terhadap pengalaman masa lalu. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana Chiang Kai Shek mengaplikasikan pelatihan militer yang diterimanya di Jepang dalam berbagai peristiwa revolusioner, terutama dalam mengonsolidasikan kekuatan bersenjata di bawah bendera Kuomintang, serta bagaimana ia merespons situasi yang dinamis di medan perang.

Selain itu, konsep revolusi sosial digunakan untuk menjelaskan dinamika dan perubahan sosial-politik yang terjadi di Tiongkok selama masa transisi dari Dinasti Qing ke Republik Tiongkok. Dalam hal ini, Skocpol (2015: 3) menekankan bahwa revolusi sosial adalah transformasi mendasar dari struktur negara dan kelas yang didorong oleh pergolakan kelas yang muncul dari krisis politik dan ekonomi. Konsep ini membantu untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil di era akhir kekuasaan Dinasti Qing menciptakan peluang bagi pergerakan revolusi. Chiang Kai Shek

sebagai tokoh militer, bukan hanya terlibat dalam aksi militer, tetapi juga turut serta dalam perubahan sosial yang lebih luas, karena kekuatan militer berperan penting dalam menentukan arah dan hasil dari pergerakan revolusioner.

Lebih lanjut, teori relasi kuasa dari Lukes (2021: 16) memberikan kerangka untuk menganalisis hubungan antara Chiang Kai Shek dan Sun Yat Sen serta pengaruh kekuasaan dalam interaksi mereka. Lukes menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya melibatkan pengendalian tindakan langsung tetapi juga pengaturan preferensi, kepercayaan, dan persepsi orang-orang. Dalam konteks ini, pendekatan relasi kuasa digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana Chiang Kai Shek berhasil mendapatkan kepercayaan dan otoritas dari Sun Yat Sen, yang pada akhirnya mempengaruhi posisinya dalam Kuomintang dan politik Tiongkok secara keseluruhan. Dengan demikian, teori ini menyoroti dimensi kekuasaan yang berperan dalam pembentukan hierarki dan relasi kepemimpinan antara Chiang Kai Shek dan Sun Yat Sen, yang membentuk keputusan strategis dalam pergerakan revolusioner mereka.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. *Tahap pertama* adalah heuristik, dengan penulis mengumpulkan berbagai sumber yang relevan mengenai Chiang Kai Shek. Sumber-sumber tersebut meliputi biografi, buku-buku sejarah Tiongkok, serta dokumen lain yang berkaitan dengan konteks revolusi di Tiongkok. Buku-buku ini diperoleh melalui Perpustakaan

Universitas Indonesia serta berbagai koleksi buku digital dari sumber-sumber daring yang dapat dipercaya.

Tahap kedua dalam metode sejarah adalah kritik sumber. Pada tahap ini, penulis menilai validitas dan reliabilitas dari semua sumber yang telah dikumpulkan selama tahap heuristik. Kritik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern menguji kredibilitas isi dari setiap sumber untuk memastikan keaslian konten yang disajikan, sedangkan kritik ekstern menelaah asal usul sumber, latar belakang penulis, dan informasi lainnya untuk menjamin keabsahan sumber tersebut. Tujuan utama dari kritik sumber ini adalah untuk mencegah terjadinya bias dalam penulisan hasil penelitian.

Tahap ketiga adalah interpretasi, dengan penulis menganalisis fakta-fakta sejarah yang telah melalui proses kritik. Pada tahap ini, penulis akan menafsirkan berbagai sumber yang menjelaskan keterlibatan dan kontribusi Chiang Kai Shek dalam peristiwa sejarah yang terjadi di Tiongkok. Fokus interpretasi adalah menggambarkan peran Chiang Kai Shek mulai dari awal perjuangannya hingga keterlibatannya dalam Revolusi Kedua pada tahun 1913. Dalam tahap ini, penulis juga melakukan perbandingan antara berbagai sumber yang berbeda untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih kaya mengenai peran Chiang Kai Shek dalam konteks revolusi di Tiongkok.

Tahap terakhir dalam metode sejarah ini adalah historiografi. Pada tahap ini, penulis merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah yang berkaitan dengan Chiang Kai Shek berdasarkan tiga tahap sebelumnya. Rekonstruksi ini dilakukan secara deskriptif dan kronologis,

menghubungkan berbagai peristiwa untuk menghasilkan narasi sejarah yang koheren. Dengan pendekatan historiografi ini, penulis berupaya untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang peran Chiang Kai Shek dalam Revolusi Xinhai hingga Revolusi Kedua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenai Chiang Kai Shek

Chiang Kai Shek lahir pada 31 Oktober 1887 di Xikou, sebuah desa yang terletak di distrik Fenghua, provinsi Zhejiang, Tiongkok, pada masa kekuasaan Dinasti Qing (Loh, 1971: 4). Lahir dari keluarga yang bekerja di bidang perdagangan, khususnya perdagangan garam, latar belakang keluarganya memberikan pengaruh awal yang signifikan pada masa kecilnya. Meskipun berasal dari keluarga pedagang, masa kecil Chiang Kai Shek diwarnai dengan rasa ingin tahu yang besar dan berbagai tindakan kenakalan. Salah satu insiden yang menonjol adalah ketika pada usia tiga tahun, Chiang Kai Shek mencoba memasukkan sepasang sumpit ke dalam tenggorokannya untuk melihat seberapa jauh sumpit tersebut bisa masuk. Insiden lainnya terjadi saat musim dingin, ketika Chiang Kai Shek terpesona oleh pantulan air beku di gentong air yang digunakan untuk menampung air hujan dan mencoba mengambilnya, namun malah terperosok ke dalam dan hampir tenggelam karena tidak ada yang menyadari (Furuya, 1981: 5).

Memasuki usia lima tahun, Chiang Kai Shek mulai mengembangkan kebiasaan untuk mandi di sungai yang terletak di depan rumahnya. Meskipun sering kali arusnya deras, ia tampak menikmati aktivitas tersebut, meski beberapa kali

hampir tenggelam. Ibunya yang khawatir akan keselamatannya memutuskan untuk menyekolahkannya pada usia yang relatif muda. Menurut Chiang Kai Shek, keputusan untuk menyekolahkannya adalah upaya ibunya untuk mencegah dirinya melakukan kenakalan yang lebih parah, yang bisa saja membahayakan nyawanya (Pantsov, 2023: 22). Chiang Kai Shek memulai masa pendidikannya dengan Jen Chieh-Mei sebagai guru pertamanya, yang mengajarkannya membaca dan menulis. Dua tahun kemudian, Jen digantikan oleh Chiang Chin-Fan, seorang intelektual lokal, yang terus membimbing Chiang Kai Shek sampai tahun 1894, sebelum Jen Chieh-Mei kembali untuk mengajar Chiang Shek sampai akhir hayatnya pada tahun 1895 (Furuya, 1981: 7).

Selama masa belajarnya, Chiang Kai Shek menunjukkan ketekunan yang luar biasa dalam mempelajari teks-teks Konghucu/Konfusianisme. Chiang Kai Shek berhasil menguasai dan memahami *Empat Buku Konfusianisme* (四書, *sì shū*), yang terdiri dari *Da Xue* (大學, *Dà Xué*, “Pembelajaran yang Berharga”) dan *Zhong Yong* (中庸, *Zhōng Yōng*, “Doktrin Baik atau Jalan Tengah”). Pada usia tujuh tahun, Chiang Kai Shek berhasil menyelesaikan pembacaan *Lun Yu* (論語, *Lún Yǔ*, “Analects”) dan *Mengzi* (孟子, *Mèngzǐ*, “Mencius”) (Loh, 1971: 14). Penuntasan karya-karya awal ini merupakan pencapaian yang cukup mengesankan bagi seorang anak seusianya. Setelah menyelesaikan empat buku utama Konfusianisme tersebut, Chiang Kai Shek melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari lima kanon Konfusianisme lainnya, yang terdiri dari *Shijing* (詩經, “Kumpulan Pujian Klasik”), *Shujing* (書經, “Kumpulan Dokumen”), *I Ching* (易

經, “Buku Perubahan”), *Chunqiu* (春秋, “Catatan Sejarah Musim Semi dan Gugur”), dan *Liji* (禮記, “Buku Ritual”) (Hsiung, 1948: 36).

Pada tahun 1903, ketika usianya mencapai 17 tahun, Chiang Kai Shek memutuskan untuk mendaftarkan diri di *Feng-lu Hsueh-t'ang* (鳳廬學堂, “Phoenix Mountain School”) yang terletak di provinsi Fenghua. Sekolah ini merupakan jenis sekolah baru yang selain mengajarkan pembelajaran klasik Tiongkok, juga mulai memperkenalkan ilmu-ilmu modern seperti Bahasa Inggris dan Aritmatika. Meskipun sekolah ini mencoba menyeimbangkan antara pembelajaran klasik dan modern, Chiang Kai Shek merasa kecewa karena pembelajaran klasik masih lebih diutamakan. Perasaan tidak puas ini mendorong Chiang Kai Shek untuk memimpin demonstrasi siswa, dengan mereka menuntut adanya reformasi kurikulum yang lebih menekankan pada ilmu-ilmu modern (Loh, 1971: 14–15).

Akibat tindakannya, Chiang Kai Shek hampir dikeluarkan dari sekolah karena dianggap melanggar peraturan. Namun, pihak sekolah akhirnya mengizinkannya melanjutkan pendidikan setelah adanya pembelaan yang menyatakan bahwa tindakannya didorong oleh semangat reformasi. Meskipun demikian, ketidakpuasannya terhadap sekolah tersebut membuat Chiang Kai Shek memutuskan untuk meninggalkan *Feng-lu Hsueh-t'ang* pada tahun 1905 dan pindah ke *Chien-chin Hsueh-t'ang* (劍金學堂, “Golden Arrow School”) di Provinsi Ningbo. Sekolah ini didirikan oleh Gu Qinglian, seorang lulusan Institut Pendidikan Yokohama, Jepang, yang kemudian menjadi salah satu

sosok paling berpengaruh dalam masa muda Chiang Kai Shek (Pantsov, 2023: 25).

Gu Qinglian memperkenalkan Chiang Kai Shek kepada gagasan revolusi nasional Tiongkok yang berada di bawah pemerintahan asing Dinasti Qing. Dalam pandangan Gu Qinglian, Dinasti Qing yang dipimpin oleh suku asing tidak mampu menjaga kedaulatan Tiongkok dari intervensi dan invasi negara-negara Barat. Gu Qinglian juga memperkenalkan Chiang Kai Shek kepada sosok Sun Yat Sen, yang pada saat itu menggunakan nama samaran Nakayama Kiroki selama berada di Jepang. Selain itu, Gu Qinglian juga menekankan pentingnya studi militer dan memperkenalkan karya klasik seperti *Art of War* karya Sun Tzu sebagai bagian penting dari pendidikan Chiang Kai Shek (Pantsov, 2023: 25).

Gu Qinglian meyakini bahwa pendidikan militer merupakan dasar penting dalam mencapai revolusi nasional Tiongkok. Menurutnya, untuk mempertahankan revolusi yang sedang berjalan atau melindungi suatu negara merdeka, diperlukan kekuatan militer yang kuat dan terorganisir. Gu Qinglian tidak hanya memperkenalkan Chiang Kai Shek kepada gagasan revolusi, tetapi juga mendorong siswa-siswanya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin di luar negeri, terutama di Jepang. Dorongan dan arahan dari Gu Qinglian ini membuka cakrawala baru dalam pemikiran Chiang Kai Shek tentang pentingnya peran militer dalam menjaga kedaulatan negara (Pantsov, 2023: 25).

Pemikiran revolusioner dan pentingnya peran militer yang diajarkan oleh Gu Qinglian menjadi

titik balik dalam hidup Chiang Kai Shek. Ia mulai memantapkan dirinya untuk menekuni karier militer, meninggalkan jalan hidup yang diharapkan keluarganya sebagai seorang pedagang. Keputusan ini merupakan awal dari perjalanan Chiang Kai Shek menuju panggung sejarah, dengan kelanjutan bahwa ia akan memainkan peran penting dalam transisi Tiongkok dari kekuasaan Dinasti Qing menuju pembentukan republik modern.

Chiang Kai Shek Masuk ke Dalam Akademi Militer

Pada April 1906, Chiang Kai Shek yang saat itu berumur 18 tahun berpamitan kepada keluarganya dengan tujuan mendaftar di Akademi Militer di Jepang. Keputusan ini mendapat tentangan dari keluarganya yang khawatir tentang risiko dan arah yang akan diambil oleh Chiang Kai Shek. Namun, Chiang Kai Shek tetap teguh pada keputusannya, dengan keyakinan bahwa karier militer akan membantu mewujudkan revolusi nasional Tiongkok yang direncanakan oleh Sun Yat Sen. Sebelum pergi, Chiang Kai Shek menuju Shanghai untuk menaiki kapal menuju Jepang. Sebagai simbol pilihannya sebagai seorang revolusioner, ia memotong rambut panjangnya dan mengirimkannya kepada keluarganya, sebuah tindakan yang sarat makna (Loh, 1971: 17).¹

Setelah tiba di Jepang, Chiang Kai Shek menghadapi tantangan baru. Ia tidak bisa langsung mendaftar ke akademi militer atau sekolah negeri mana pun karena perjanjian

¹ Rambut panjang yang diikat (*Queue*) merupakan kewajiban bagi seluruh laki-laki yang berada di Tiongkok pada masa Dinasti Qing. Gaya rambut Qing menjadi tanda patuh masyarakat terhadap

pemerintahan Qing. Memotong rambut tersebut, menandakan bahwa seseorang sudah tidak patuh dan dapat berakibat hukuman mati.

antara Dinasti Qing dan Jepang pada 2 Maret 1905. Perjanjian ini melarang warga Tiongkok tanpa surat persetujuan resmi dari pemerintah Qing untuk belajar di Jepang, dengan tujuan menghambat penyebaran gagasan revolusioner di kalangan pelajar Tiongkok. Sebagai alternatif, Chiang Kai Shek memilih untuk mendaftar di *Seika Gakko* (成和學校), sebuah sekolah di Tokyo yang didirikan oleh Liang Qichao pada tahun 1899. Sekolah ini menawarkan pelajaran dasar bagi warga Tiongkok yang berada di Jepang, termasuk Bahasa Inggris, fisika, dan kimia. Di *Seika Gakko*, Chiang Kai Shek mengambil kursus Bahasa Jepang sebagai persiapan untuk ujian masuk ke Akademi Militer Baoding dan juga persiapan agar dapat bersekolah di Jepang (Pantsov, 2023: 31).

Pada tahun 1907, Chiang Kai Shek kembali ke Tiongkok atas permintaan ibunya untuk menghadiri pernikahan adiknya sekaligus merayakan tahun baru Tiongkok bersama keluarga. Setelah perayaan, Chiang Kai Shek berpamitan lagi untuk pergi ke Hangzhou, ibu kota provinsi Zhejiang, guna mengikuti ujian masuk ke Akademi Militer Baoding di provinsi Hubei (Pantsov, 2023: 35–36). Akademi Baoding pada masa itu adalah institusi yang wajib diikuti bagi warga Tiongkok yang ingin belajar militer di luar negeri. Lulus dari Baoding merupakan syarat utama untuk dapat melanjutkan pendidikan militer di luar negeri, terutama di Jepang. Chiang Kai Shek berhasil melewati ujian ketat, mengingat setiap provinsi hanya menyediakan kuota terbatas bagi suku Han. Untuk Zhejiang, terdapat 40 kuota, 26 melalui nominasi dan 14 melalui ujian terbuka. Chiang Kai Shek adalah salah satu dari 14 orang yang lolos ujian tersebut (Furuya, 1981: 12).

Pada musim panas 1907, Chiang Kai Shek secara resmi menjadi siswa di Akademi Baoding dan mulai menjalani pelatihan intensif. Pendidikan di Baoding merupakan kombinasi dari kuliah umum dan pelatihan fisik yang ketat. Meski merasa satu impiannya sudah terwujud, Chiang Kai Shek menyadari adanya perbedaan tajam antara siswa dari etnis Manchu dan Han. Banyak siswa Manchu diterima di Baoding melalui jalur nominasi tanpa perlu mengikuti ujian ketat, sementara siswa Han harus melewati seleksi ketat. Selain itu, Chiang Kai Shek adalah satu-satunya siswa yang telah memotong rambut panjangnya, sebuah tanda yang secara diam-diam menunjukkan kecenderungannya sebagai revolusioner (Hsiung, 1948: 52). Kondisi ini memaksanya untuk berhati-hati dalam bersikap, namun Chiang Kai Shek tetap menunjukkan keberaniannya ketika menghadapi ketidakadilan.

Salah satu insiden yang membuatnya menonjol terjadi saat seorang instruktur Jepang di kelas kesehatan membandingkan sepotong tanah dengan penduduk Tiongkok, dengan mengatakan bahwa tanah itu mengandung 400 juta mikroba, sama dengan jumlah penduduk Tiongkok. Tidak rela negaranya disamakan dengan mikroba, Chiang Kai Shek maju ke depan kelas, mengambil tanah tersebut, membaginya menjadi delapan bagian, dan mengatakan bahwa bagian tersebut mewakili Jepang. Tindakan ini memancing kemarahan instruktur, yang langsung melaporkan Chiang Kai Shek kepada kepala akademi dengan tuduhan pembangkangan terhadap perwira tinggi, sebuah pelanggaran serius. Namun, kepala akademi yang merupakan seorang patriot hanya memberikan teguran lisan kepada Chiang Kai Shek (Hsiung, 1948: 53–54).

Pada akhir tahun 1907, Departemen Perang Qing mengadakan ujian seleksi bagi siswa di Baoding untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang. Pada awalnya, Chiang Kai Shek tidak memenuhi syarat karena tidak mengambil kelas Bahasa Jepang selama di Baoding. Namun, Chiang Kai Shek mengajukan banding dengan alasan bahwa ia telah belajar Bahasa Jepang di *Seika Gakko* di Tokyo. Bandingnya diterima oleh kepala akademi, dan Chiang Kai Shek diperbolehkan mengikuti ujian seleksi. Dari 40 siswa yang lulus seleksi, Chiang Kai Shek termasuk di dalamnya (Furuya, 1981: 13).

Pada awal tahun 1908, rombongan siswa dari Baoding tiba di Jepang dan melanjutkan pendidikan mereka di *Shinbun Gakko* (振武學校), sebuah sekolah yang didirikan pada tahun 1903 khusus untuk siswa Tiongkok guna mendapatkan pelatihan militer lanjutan.² Selain pelatihan militer, kadet juga belajar berbagai mata pelajaran umum seperti Bahasa Jepang, matematika, sejarah, geografi, biologi, dan menggambar. Selama menjadi kadet di *Shinbun Gakko*, Chiang Kai Shek bertemu dengan Chen Qi Mei, seorang tokoh revolusioner yang juga pengikut awal Sun Yat Sen. Atas rekomendasi Chen Qi Mei, pada tahun 1908 Chiang Kai Shek bergabung dengan organisasi *Tongmenghui* (同盟會, “Liga Bersatu” atau “Masyarakat Aliansi”) yang didirikan oleh Sun Yat Sen (Crozier, 1976: 38).

Sun Yat Sen dan anggota *Tongmenghui* merencanakan berbagai pemberontakan di Tiongkok untuk menggulingkan Dinasti Qing.

Chiang Kai Shek menawarkan diri untuk bergabung dalam pemberontakan, namun Sun Yat Sen menolaknya dengan pesan agar Chiang Kai Shek menyelesaikan pendidikan militer terlebih dahulu. Pesan ini tidak hanya berlaku bagi Chiang Kai Shek, tetapi juga bagi semua kadet Tiongkok di Jepang. Sun Yat Sen menekankan bahwa pendidikan militer adalah elemen penting dalam upaya melanjutkan revolusi nasional di Tiongkok (Crozier, 1976: 39).

Chiang Kai Shek dinyatakan lulus dari *Shinbun Gakko* pada November 1910 dengan nilai “cukup,” berada di peringkat 55 dari 62 kadet Tiongkok dengan nilai 68 dari 100. Meskipun bukan peringkat tertinggi, nilai ini cukup untuk melanjutkan ke praktik militer lapangan (Pantsov, 2023: 38–39). Sebelum melanjutkan ke tingkat lebih lanjut di Akademi Militer Jepang, Chiang Kai Shek dan kadet lainnya ditempatkan di berbagai kesatuan militer Jepang untuk mendapatkan pengalaman praktis. Chiang Kai Shek ditempatkan di Resimen Ke-19 Artilleri Lapangan dari Divisi Ke-13 yang terletak di Takeda (sekarang Joetsu), Provinsi Niigata, pada 5 Desember 1910. Di sana, Chiang Kai Shek bergabung dengan kompi ke-5 dari batalyon ke-2 dengan pangkat *Nitōhei* (二等兵, setara dengan Prajurit Satu dalam kepangkatan TNI) (Yamada, 2017: 18).

Selama praktik lapangan di Takeda, Chiang Kai Shek mengalami pelatihan keras yang melibatkan rutinitas seperti membersihkan kandang kuda dan melakukan mars di jalanan bersalju. Chiang Kai Shek menyadari bahwa pelatihan ini akan mempersiapkannya untuk

² Dari 1903 sampai 1905, *Shinbun Gakko* dirancang dalam kurikulum masa pendidikan selama lima belas bulan. Memasuki 1905, dinaikkan menjadi 18 bulan. Kemudian pada 1906, ditambah

lagi menjadi tiga tahun. Chiang Kai Shek belajar di *Shinbun Gakko* selama tiga tahun (Furuya, 1981: 14).

menghadapi tantangan yang lebih besar di medan pertempuran. Pengalaman di Takeda membuatnya memahami bahwa disiplin keras, indoktrinasi politik, dan pendidikan teknis adalah kunci ketangguhan tentara Jepang (Pantsov, 2023: 39).

Pembelajaran yang didapat oleh Chiang Kai Shek selama di Jepang, akan segera diperlakukan olehnya. Kesempatan tersebut datang dari peristiwa pemberontakan Wuchang dan revolusi kedua. Bukan hanya dalam keahlian memimpin pasukan, tetapi pemikirannya juga mengenai revolusi dan bagaimana kedepannya negara Tiongkok akan berjalan semakin berkembang. Pendidikan politik yang didapat olehnya di Jepang, juga menjadi dasar ia berpijak untuk memasuki dunia politik Tiongkok di masa selanjutnya.

Chiang Kai Shek dalam Revolusi 1911

Pada tanggal 9 Oktober 1911, sebuah ledakan besar terjadi di konsesi Rusia di Hankou. Polisi Rusia segera melakukan investigasi untuk mencari sumber ledakan tersebut dan menemukan bahwa tempat itu adalah markas rahasia dari *Gongjinhui* (共進會, *Gòngjīnhuì*, “Perkumpulan untuk Tujuan Bersama”). Organisasi ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Qing yang dianggap korup dan tidak mampu mempertahankan kedaulatan Tiongkok. Temuan polisi Rusia segera diserahkan kepada pihak otoritas Qing, yang kemudian menangkap 30 orang anggota *Gongjinhui* yang ada di lokasi kejadian dan menyita daftar anggota organisasi tersebut (Fenby, 2004: 30). Menyusul kejadian ini, pemerintahan Qing memberlakukan darurat militer di tiga kota strategis, yaitu Hankou,

Wuchang, dan Hanyang. Anggota *Gongjinhui* yang sebagian besar terdiri dari prajurit khawatir nama mereka berada dalam daftar yang disita, sehingga memicu mereka untuk segera memulai pemberontakan.

Pada 10 Oktober 1911, prajurit dari Batalion Zeni Ke-8 memulai aksi pemberontakan di Wuchang. Mereka menyingkirkan empat perwira yang masih setia kepada Dinasti Qing, dan kemudian bergabung dengan Brigade Campuran Ke-21 untuk menyerang gudang persenjataan dengan tujuan merebut seluruh isinya. Setelah berhasil, para revolusioner melanjutkan serangan ke kantor pemerintahan setempat (*Yamen* 衙門, *yámen*). Pada 11 Oktober, Wuchang dan Hanyang—yang merupakan pusat industri persenjataan Dinasti Qing—berada di tangan para revolusioner. Hankou juga berhasil direbut pada 12 Oktober, sehingga dalam waktu tiga hari, seluruh wilayah Wuchang, Hanyang, dan Hankou, yang dikenal sebagai Wuhan, telah jatuh ke tangan pasukan revolusioner. Keberhasilan yang cepat ini terjadi secara spontan tanpa rencana matang, dan tidak ada tokoh sentral yang memimpin pergerakan ini. Peristiwa ini memicu pemberontakan di berbagai wilayah lain di Tiongkok (Furuya, 1981: 28–29).

Di saat peristiwa bersejarah ini berlangsung, Chiang Kai Shek tidak sedang berada di medan tempur. Bulan sebelumnya, ia berada di Shanghai untuk bertemu dengan Chen Qi Mei, yang saat itu sedang merencanakan pemberontakan di sepanjang Sungai Yangtze hingga Provinsi Hubei. Chiang Kai Shek baru mengetahui revolusi yang terjadi di Wuchang setelah ia kembali ke Jepang. Chen Qi Mei mengirimkan telegram kepada Chiang Kai Shek, memintanya segera kembali ke Tiongkok untuk

bergabung dalam revolusi yang sedang berlangsung. Bersama kadet-kadet Tiongkok lainnya yang berada di Jepang, Chiang Kai Shek segera bersiap untuk kembali ke negaranya. Mereka meminta izin kepada Jenderal Nagaoka Gaishi, komandan Divisi Ke-13, untuk mendapatkan ‘izin pergi tanpa batas waktu.’ Namun, permintaan ini ditolak oleh Nagaoka, yang beralasan bahwa perjanjian dengan pemerintah Qing melarang mereka kembali ke Tiongkok sebelum menyelesaikan pendidikan atau mendapatkan izin resmi dari Qing (Furuya, 1981: 31).

Dengan izin yang tidak kunjung diberikan, Chiang Kai Shek bersama 119 kadet lainnya meminta izin kepada komandan resimen mereka, Sersan Shimoda, dengan alasan ‘izin pergi selama 48 jam’—waktu maksimal yang bisa diberikan komandan resimen untuk meninggalkan barak. Sersan Shimoda memberikan izin kepada Chiang Kai Shek beserta kadet-kadet Tiongkok lainnya. Para perwira menengah di resimen ini mengetahui alasan sebenarnya di balik pengajuan izin secara massal, yaitu untuk kembali ke Tiongkok dan ikut serta dalam revolusi. Mereka secara simbolis mengadakan acara perpisahan, mengisi gelas-gelas mereka dengan air sebagai lambang semangat *bushido* (武士道) Jepang, menyiratkan bahwa mereka siap untuk tidak kembali hidup-hidup (Furuya, 1981: 31).

Chiang Kai Shek dan kadet-kadet Tiongkok meninggalkan Takeda dengan kereta api menuju pemberhentian pertama mereka, yaitu Tokyo. Sesampainya di Tokyo, Chiang Kai Shek

meminta dana dari *Tongmenghui* (同盟會, *Tóngménghuì*, “Liga Bersatu”) untuk biaya pulang ke Tiongkok. Setelah mendapatkan dana, mereka melanjutkan perjalanan menuju Nagasaki menggunakan kereta api. Dalam perjalanan ini, Chiang Kai Shek dan kadet-kadet lainnya mengganti pakaian militer mereka dengan pakaian sipil untuk menghindari deteksi oleh polisi militer Jepang. Peraturan militer Jepang menyatakan bahwa setiap prajurit yang izinnya telah habis dan tidak kembali akan dianggap sebagai desertir, baik itu tentara Jepang maupun Tiongkok yang sedang belajar di Jepang. Untuk menghindari status desertir, mereka mengirim kembali seragam dan pedang seremonial mereka ke markas Divisi Ke-13. Akhirnya, Kementerian Perang Jepang menyatakan bahwa kadet-kadet Tiongkok yang kembali ke negaranya diberhentikan secara hormat. Pada 30 Oktober, mereka berlayar dari Nagasaki menuju Shanghai (Furuya, 1981: 31–32).

Sesampainya di Shanghai, Chiang Kai Shek segera menemui Chen Qi Mei yang sedang merencanakan penyerangan terhadap gudang persenjataan di kota tersebut serta kantor pemerintahan di Hangzhou, provinsi kampung halamannya, Zhejiang. Chen Qi Mei menugaskan Chiang Kai Shek untuk merekrut para pemuda dari distrik Fenghua yang berada di Shanghai untuk membentuk ‘pasukan berani mati’ (敢死隊, *gǎnsǐduì*). Chiang Kai Shek berhasil merekrut 120 orang yang dijanjikan akan dibayar sebesar 16 dolar Tiongkok (Pantsov, 2023: 41).³ Pada 3 November 1911, Chiang Kai

³ 16 Dolar Tiongkok merupakan jumlah uang yang cukup besar di saat itu. Penarik *Rickshaw* (mirip dengan becak, namun ditarik oleh

manusia) hanya bisa mendapatkan lebih kurang sebanyak 15 dolar selama sebulan.

Shek bersama pasukannya bergerak ke Hangzhou dengan tujuan membawa revolusi ke kampung halamannya. Namun, setibanya di Zhejiang, Chiang Kai Shek mendapati bahwa pertahanan Qing telah diperkuat. Revolusi yang pecah pada 10 Oktober membuat hampir semua provinsi Qing meningkatkan pertahanan mereka masing-masing (Hsiung, 1948: 67).

Pasukan yang dipimpin oleh Chiang Kai Shek menghadapi tantangan serius, termasuk kurangnya pelatihan dasar militer dan minimnya persenjataan. Setiap tentara hanya dibekali lima peluru dan beberapa granat. Oleh karena itu, pasukan Chiang Kai Shek bukan menjadi inti serangan, melainkan pasukan pembuka jalan bagi serangan revolusioner di Zhejiang. Inti pasukan revolusioner sebenarnya terdiri dari Batalion Ke-3 dari Resimen Ke-82 *Pasukan Baru* (新建陸軍, *Xīnjiàn Lùjūn*), yang setuju untuk membelot ke pihak revolusioner (Hsiung, 1948: 67). Serangan dijadwalkan pada 4 November pukul 2 siang.

Chiang Kai Shek memimpin serangan ke gedung pemerintah gubernur Zhejiang dengan membagi pasukannya menjadi unit-unit yang masing-masing terdiri dari 15 prajurit. Serangan dibuka dengan lemparan bahan peledak buatan Ying bersaudara, yang berhasil membakar gedung tersebut. Pertahanan pasukan Qing di gedung gubernur runtuh dengan cepat, dan gubernur Zhejiang berhasil ditangkap hidup-hidup. Pasukan revolusioner kemudian melanjutkan serangan ke gudang senjata dan gedung-gedung publik di Hangzhou. Pertempuran sengit terjadi saat pasukan revolusioner mengepung markas tentara Bannerman (八旗, *bāqí*), pasukan elit Manchu. Pertempuran berlangsung hingga 6 November,

ketika persediaan pasukan Qing mulai habis, memaksa mereka menyerah kepada pasukan revolusioner. Pasukan Bannerman diperlakukan dengan baik oleh revolusioner dan dilebur ke dalam pasukan revolusi Tiongkok (Hsiung, 1948: 68).

Keberhasilan pembebasan Zhejiang dari kekuasaan Qing tidak lepas dari peran pasukan Chiang Kai Shek yang menjadi elemen kunci dalam membuka jalan bagi serangan. Namun, media lokal di Zhejiang tidak menyebutkan nama Chiang Kai Shek dalam laporan mereka tentang peristiwa tersebut. Chiang Kai Shek tidak kecewa, karena baginya, yang terpenting adalah kontribusinya dalam perjuangan revolusi Tiongkok. Ia mengungkapkan keyakinannya dalam sebuah surat kepada ibunya sebelum menyerang Hangzhou, memohon maaf karena tidak bisa berbakti kepada ibunya dan bersumpah untuk mengabdikan nyawanya bagi revolusi (Pantsov, 2023: 41).

Setelah keberhasilan di Zhejiang, Chiang Kai Shek kembali ke Shanghai untuk menemui Chen Qi Mei, yang baru diangkat sebagai gubernur militer Shanghai. Banyaknya kadet Tiongkok yang kembali dari Jepang membuat pemerintahan sementara revolusioner kewalahan dalam membayar gaji serta memelihara peralatan militer mereka. Chen Qi Mei memerintahkan agar pasukan Chiang Kai Shek dilatih ulang dan dipersenjatai dengan standar militer, serta dipertahankan sebagai pasukan yang merekrut orang miskin, kelas pekerja, dan anggota *Green Gang* (青幫, *Qīngbāng*). Pasukan ini kemudian direorganisasi

dan dinamakan Resimen Shanghai Ke-5 (Pantsov, 2023: 42).⁴

Sementara itu, gelombang revolusi terus menyebar ke seluruh daratan Tiongkok, dan satu per satu provinsi mulai mendeklarasikan kemerdekaannya dari pemerintahan Qing. Para pemimpin revolusi merencanakan pembentukan pemerintahan pusat yang baru, dan Shanghai dipilih sebagai tempat pertemuan karena situasinya yang kondusif di bawah kekuasaan revolucioner. Pada 15 November 1911, rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk mengakui pemerintahan revolusi Wuchang sebagai pemerintah pusat, dengan Li Yuanghong sebagai kepala pemerintahan. Delegasi dari berbagai provinsi kemudian berkumpul di Wuchang pada 30 November untuk menyusun struktur pemerintahan sementara Republik Tiongkok (Taylor, 2009: 24–26).

Pemilihan presiden Republik Tiongkok dilakukan pada rapat di Nanjing pada 29 Desember 1911. Terjadi perdebatan sengit mengenai bentuk negara antara faksi yang mendukung pemerintah federal dengan presiden sebagai kepala negara, dan faksi yang mendukung kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden. Selain itu, masalah pembagian jabatan gubernur militer juga menimbulkan polemik, khususnya antara Tao Chengzhang dari organisasi *Guangfuhui* (光復會, “Perkumpulan Pemulihan”) dan Chen Qi Mei dari *Tongmenghui*. Tao Chengzhang menginginkan jabatan gubernur Zhejiang, namun permintaannya ditolak

oleh Chen Qi Mei yang lebih mendahulukan anggota *Tongmenghui*. Konflik ini mencapai puncaknya ketika Tao merasa terancam dan memilih untuk bersembunyi di rumah sakit. Pada 14 Januari 1912, atas perintah Chen Qi Mei, seorang pembunuh bayaran dikirim untuk menghabisi nyawa Tao di rumah sakit (Taylor, 2009: 24).

Meskipun terdapat konflik, keputusan rapat di Nanjing menetapkan bentuk pemerintahan Republik Tiongkok dengan presiden sebagai pemimpin tertinggi. Sun Yat Sen dipilih sebagai presiden pertama, dan Li Yuanghong sebagai wakil presiden. Pada 1 Januari 1912, Sun Yat Sen dilantik di Nanjing, yang ditetapkan sebagai ibu kota Republik Tiongkok. Sebagai bentuk kontinuitas dari pemerintahan Han sebelumnya, Sun Yat Sen berkunjung ke makam kaisar pertama Dinasti Ming untuk menunjukkan simbolisasi peralihan kekuasaan dari dinasti asing Manchu (Lary, 2007: 46).

Namun, pelantikan Sun Yat Sen tidak menyelesaikan semua masalah, melainkan menimbulkan perseteruan antara Sun dan Jenderal Yuan Shi Kai, komandan tertinggi pasukan Qing. Sun Yat Sen tidak memiliki tentara terpusat yang dapat diandalkan, dan pemerintahannya kekurangan dana serta menghadapi kekacauan di berbagai wilayah. Yuan Shi Kai, yang berbasis di Beijing, mengirimkan utusan kepada pihak revolusi untuk membahas perdamaian dengan syarat bahwa Yuan akan ditunjuk sebagai presiden. Li Yuanghong sebagai ketua revolusi sementara

⁴ Green Gang (青幫, *Qīngbāng*) adalah salah satu perkumpulan ‘mafia’ Shanghai yang memiliki banyak jaringan kriminalitas, seperti perdagangan opium, pemerasan, prostitusi dan perjudian. Selama revolusi Xinhai berlangsung, Green Gang aktif dalam mensponsori kegiatan yang dilakukan oleh Sun Yat Sen dengan tujuan

menumbangkan kekuasaan Qing. Di bawah Chiang Kai Shek, Green Gang ‘dipelihara’ untuk melakukan tindakan represif, seperti membubarkan rapat serikat pekerja dan operasi anti-komunis.

menyetujui perjanjian tersebut, meminta agar kaisar Qing turun takhta dengan jaminan keamanan dari Yuan Shi Kai (Zarrow, 2006: 33–34).

Akhirnya, pada 12 Maret 1912, Yuan Shi Kai dilantik sebagai presiden baru Republik Tiongkok di Beijing, setelah kaisar Qing turun takhta dan Sun Yat Sen menyerahkan kekuasaan kepadanya. Yuan memindahkan ibu kota ke Beijing dan menempatkan kantor pemerintahan pusat di sana. Sebagai balasan, Yuan memberikan jabatan kepada Sun berupa kepala biro perkeretaapian dengan wewenang untuk membangun jaringan kereta api di seluruh Tiongkok (Taylor, 2009: 25–26).

Penyerahan kekuasaan dari Sun Yat Sen kepada Yuan Shi Kai ditentang oleh Chiang Kai Shek dan Chen Qi Mei. Meskipun penyerahan tersebut tidak mengganggu posisi Chiang Kai Shek sebagai komandan divisi ‘berani mati,’ Chiang memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai bentuk protes dan kembali ke Jepang dengan alasan melanjutkan pendidikan. Selama di Jepang, Chiang aktif menulis di majalah *Voice of the Army* (軍聲, *Jūn shēng*), tempat ia menegaskan bahwa Tiongkok harus dipimpin oleh pemerintahan despotik yang menggabungkan ide-ide Washington dan metode Napoleon, serta harus memiliki semangat revolusi dan kesetaraan dengan negara-negara Eropa. Chiang juga menyatakan pentingnya mempertahankan kedaulatan Tiongkok, termasuk perlindungan terhadap Mongolia dari pengaruh Rusia (Pantsov, 2023: 46).

Chiang Kai Shek dalam Revolusi Kedua

Selama di Jepang, Chiang Kai Shek juga mempelajari bahasa Jerman dengan tujuan akhir

melanjutkan studi di Eropa. Namun, niatnya terhenti karena Chen Qi Mei memintanya untuk kembali dan mempersiapkan Revolusi Kedua melawan Yuan Shi Kai. Partai *Tongmenghui* (同盟會, *Tóngménghui*) direkonstruksi ulang dan diubah namanya menjadi *Kuomintang* (中國國民黨, *Zhōngguó Guómíndǎng*) di bawah pimpinan Song Jiao Ren, seorang organisator kampanye yang cerdik. Song berhasil menarik dukungan dari kelas menengah, pemilik tanah, dan pedagang besar dengan tidak menyebutkan prinsip sosialisme *Kuomintang*. Menurut Song, jika tetap menonjolkan sosialisme, kelas-kelas tersebut mungkin akan menolak mendukung *Kuomintang*. Berkat kampanye politiknya, *Kuomintang* memenangkan pemilu 1912–1913 dengan memperoleh 269 dari 596 kursi DPR dan 123 dari 274 kursi DPD. Hal ini menjadikan *Kuomintang* sebagai partai terkuat, yang memungkinkan mereka untuk membentuk koalisi dengan partai-partai kecil lainnya (Fenby, 2004: 35).

Namun, pada 22 Maret 1913, Song Jiao Ren dibunuh di Shanghai oleh seorang pembunuh bayaran yang diduga disewa oleh Yuan Shi Kai (Fenby, 2004: 35). Adapun Yuan Shi Kai berdalih bahwa pembunuhan ini adalah akibat konflik internal di *Kuomintang*. Namun, bukti-bukti seperti telegram dari Peking yang ditemukan di rumah bordil tempat pembunuh ditangkap, serta senjata yang digunakan, menunjukkan keterlibatan Yuan (Fenby, 2004: 36). Meskipun berhasil mengeliminasi Song Jiao Ren, Yuan Shi Kai tetap menganggap *Kuomintang* sebagai ancaman besar bagi kekuasaannya atas Republik Tiongkok.

Yuan Shi Kai kemudian meminjam secara pribadi kepada bank konsorsium internasional sebesar 25 juta Poundsterling untuk merestrukturisasi pemerintahannya, dengan jaminan berupa pajak garam. Secara konstitusi, Yuan seharusnya meminta persetujuan dari parlemen untuk pinjaman ini, tetapi parlemen yang didominasi oleh *Kuomintang* menolak. Yuan tidak memedulikan keputusan parlemen dan tetap mengambil pinjaman tersebut. Pada 5 Mei 1913, parlemen mengeluarkan resolusi yang menyatakan pinjaman tersebut ilegal. Sebagai balasannya, Yuan mengirimkan pasukan untuk mengepung gedung parlemen dan mencopot tiga gubernur militer yang mendukung *Kuomintang*. Langkah otoriter ini memicu pecahnya Revolusi Kedua di delapan provinsi selatan yang menyatakan kemerdekaan mereka dan melawan kekuasaan Yuan Shi Kai (Crozier, 1976: 26).⁵

Dalam Revolusi Kedua, Chiang Kai Shek memainkan peran penting dalam memimpin pasukan *Kuomintang* untuk merebut gudang persenjataan di Shanghai, yang dikuasai pasukan loyalis Yuan Shi Kai. Chiang Kai Shek melakukan tiga kali serangan berturut-turut pada 22, 28, dan 29 Juli 1913, tetapi gagal karena bombardir dari angkatan laut yang setia kepada Yuan Shi Kai sedang berlabuh di pelabuhan Shanghai. Chiang Kai Shek menyalahkan kegagalannya pada pengkhianatan oleh kelas elite kaya dan pedagang besar yang telah berkompromi dengan Yuan Shi Kai (Pantsov, 2023: 48). Yuan Shi Kai berhasil menumpas Revolusi Kedua pada akhir tahun 1913. Setelah itu, Yuan membubarkan parlemen pada 6

Oktober 1913 dan mendirikan sebuah badan yang mendukung segala kebijakan Yuan. Pada 4 November, ia mengeluarkan dekret yang melarang *Kuomintang* dan pada 10 Januari 1914, ia resmi membubarkan parlemen (Crozier, 1976: 26).

Kegagalan Revolusi Kedua memaksa siswa-siswi anggota *Kuomintang*, termasuk Chiang Kai Shek dan Chen Qi Mei, untuk mengungsi ke Jepang. Di sana, Sun Yat Sen kembali mendirikan organisasi bawah tanah bernama *Zhongguo Gemingdang* (中國革命黨, “Partai Revolusioner Tiongkok”) pada 8 Juli 1914. Organisasi ini beranggotakan sekitar 400 orang dari eksodus *Kuomintang*. Berbeda dengan *Kuomintang* sebelumnya, organisasi ini menekankan sentralisme dan kerahasiaan yang lebih kuat. Chiang Kai Shek bergabung sebagai anggota ke-102, dan inilah awal kedekatannya dengan Sun Yat Sen. Sun menetapkan bahwa anggota baru harus rela berkorban demi prinsip organisasi dan tunduk pada perintahnya. Hal ini menandakan awal dari kultus kepribadian/*cult of personality* terhadap Sun Yat Sen (Pantsov, 2023: 48–50).

Chiang Kai Shek dan Chen Qi Mei sering kali menerima perintah dari Sun Yat Sen untuk kembali ke Tiongkok guna mengumpulkan dukungan dari pihak yang tidak dipengaruhi oleh Yuan Shi Kai. Chiang Kai Shek mengunjungi gubernur militer di Manchuria, namun mereka tidak memberikan jawaban pasti. Sebelum kembali ke Jepang, Chiang Kai Shek menulis surat kepada Sun Yat Sen yang memprediksi bahwa konflik besar di Eropa akan terjadi, dan

⁵ Provinsi yang melepaskan diri dari Republik Tiongkok adalah Jiangxi, Jiangsu, Shanghai, Anhui, Guangdong, Fujian, Hunan dan Sichuan.

Jepang akan memanfaatkan situasi tersebut untuk memperluas pengaruhnya di Tiongkok. Benar saja, Perang Dunia Pertama pecah pada 28 Juli 1914. Yuan Shi Kai mendeklarasikan netralitas Tiongkok, tetapi Jepang segera mengambil tindakan dengan menyerang Qingdao (青島), sebuah koloni Jerman di Provinsi Shandong. Jepang merebut Qingdao pada 7 November 1914 dan menjadikannya sebagai koloninya (Taylor, 2009: 28–29).

Pada 18 Januari 1915, Jepang mengajukan ‘21 tuntutan’ kepada Tiongkok, termasuk hak mengontrol perekonomian di Manchuria, mengambil alih wilayah Jerman di Qingdao dan Fujian, serta berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan dan ekonomi Tiongkok. Jika disetujui, tuntutan ini akan menjadikan Tiongkok sebagai semi-koloni Jepang. Yuan Shi Kai mencoba menunda penandatanganan tuntutan tersebut. Namun, saat Jepang memobilisasi pasukannya di Tiongkok, Yuan Shi Kai menyadari bahwa Tiongkok tidak mampu melawan Jepang dalam perang terbuka. Pada 7 Mei 1915, Yuan Shi Kai akhirnya menandatangani tuntutan Jepang, yang memicu kemarahan masyarakat Tiongkok (Taylor, 2009: 29).

Yuan Shi Kai yang tunduk pada tuntutan Jepang mendapat kecaman keras dari Sun Yat Sen dan rakyat Tiongkok. Kondisi ini memunculkan harapan baru bagi Sun untuk melancarkan revolusi. Sun memerintahkan Chiang Kai Shek dan Chen Qi Mei untuk kembali ke Shanghai dengan dua misi: pertama, merencanakan pembunuhan komisioner pertahanan Shanghai, Zhang Ru Sheng, dan kedua, memulai pemberontakan. Pada 10 November, dua orang bayaran Chiang Kai Shek

dan Chen Qi Mei menyergap Zhang Ru Sheng dan membunuhnya. Langkah selanjutnya adalah menyerang markas kepolisian Shanghai dengan ‘pasukan berani mati’ yang pernah dipimpin oleh Chiang Kai Shek pada revolusi 1911. Namun, serangan ini berakhir dengan kegagalan, dan Chiang Kai Shek bersama Chen Qi Mei melarikan diri ke konsesi Prancis di Shanghai (Pantsov, 2023: 29).

Yuan Shi Kai merespons dengan merencanakan pembunuhan terhadap Chen Qi Mei. Ketika Chen Qi Mei berusaha menggalang dukungan finansial dari tokoh Jepang, Chiang Kai Shek memperingatkannya untuk berhati-hati, karena mereka adalah buronan. Namun, Chen Qi Mei tetap melanjutkan pertemuannya. Di hari pertemuan, segerombolan orang bersenjata menyerbu tempat pertemuan dan menembak mati Chen Qi Mei. Chiang Kai Shek membawa jenazah Chen Qi Mei ke konsesi Prancis dan memberikannya upacara pemakaman (Fenby, 2004: 39–40).

Perseteruan antara Yuan Shi Kai dan Sun Yat Sen berakhir tiba-tiba setelah kematian Yuan Shi Kai pada 6 Juni 1916 akibat uremia (Pantsov, 2023: 54). Namun, kematian Yuan Shi Kai tidak mengakhiri konflik di Tiongkok. Perebutan dan perpecahan politik kekuasaan antara gubernur-gubernur militer loyalis Yuan Shi Kai memicu periode yang dikenal sebagai era *Warlordism* (軍閥時代, *jūnfá shídài*) (Powell, 1955: 341–342). Pada masa ini, Chiang Kai Shek yang awalnya hanya seorang tentara perlahan naik panggung politik, hingga akhirnya menjadi pemimpin tunggal *Kuomintang* setelah keberhasilan Ekspedisi Utara pada 1928.

KESIMPULAN

Revolusi Xinhai pada tahun 1911 menjadi momen krusial yang mengubah lanskap politik dan kekuasaan di Tiongkok. Keruntuhan Dinasti Qing menandai akhir dari pemerintahan yang dipimpin oleh etnis asing Manchu dan memberi kesempatan bagi rakyat suku Han untuk meraih kemerdekaan nasional. Dalam transisi ini, Chiang Kai Shek memainkan peran yang tidak menonjol di permukaan tetapi signifikan dalam konteks pergerakan revolusioner. Sebagai pemimpin pasukan sukarelawan, Chiang Kai Shek memanfaatkan pengalaman militer yang diperolehnya di Akademi Baoding dan Jepang untuk mengatur serangan di Zhejiang. Meskipun usahanya tidak selalu terdokumentasi secara eksplisit, perannya menunjukkan keberanian dan dedikasi yang berakar dari keyakinannya untuk memperjuangkan perbaikan bagi Tiongkok.

Namun, keberhasilan awal dalam menggulingkan Dinasti Qing diikuti oleh tantangan baru yang timbul akibat pengaruh Yuan Shi Kai yang menggantikan Sun Yat Sen sebagai presiden. Kebijakan otoriter Yuan, termasuk pembubaran parlemen dan pelarangan Kuomintang, memicu ketegangan politik yang memuncak pada Revolusi Kedua. Dalam periode ini, Chiang Kai Shek semakin memperkuat kedudukannya sebagai orang kepercayaan Sun Yat Sen, menjalankan perintah-perintah strategis dengan penuh kesetiaan. Meskipun Revolusi Kedua gagal, pengalaman ini mempertegas posisinya sebagai tokoh revolusioner yang setia pada tujuan politik dan militer Sun Yat Sen.

Meskipun tidak selalu mendapatkan pengakuan dalam laporan media dan dokumentasi resmi, dedikasi Chiang Kai Shek

kepada gerakan revolusioner tercermin dalam berbagai aksinya, baik dalam Revolusi Xinhai maupun Revolusi Kedua. Ketika Dinasti Qing runtuh dan Republik Tiongkok yang baru terbentuk mengalami ketidakstabilan, peran-peran kecil yang dijalankan Chiang Kai Shek menjadi fondasi penting bagi perkembangan karier politiknya. Dedikasi tanpa pamrihnya dalam berbagai misi dan kesediaannya untuk mempertaruhkan nyawa demi negara dan Sun Yat Sen menunjukkan komitmennya yang tulus.

Secara keseluruhan, dari Revolusi Xinhai hingga Revolusi Kedua, Chiang Kai Shek berperan dalam mengukuhkan struktur dan arah militer Kuomintang, serta meletakkan dasar bagi transisi Tiongkok dari kekaisaran ke republik. Hubungan dekatnya dengan Sun Yat Sen dan peran yang dimainkannya dalam berbagai peristiwa ini menjadi landasan bagi kepemimpinannya di masa mendatang, menjadikannya sosok sentral dalam sejarah revolusioner Tiongkok. Keberhasilan dan kegagalan yang ia alami tidak hanya memperkaya pengalaman pribadinya, tetapi juga turut membentuk sejarah panjang perjuangan Tiongkok menuju modernitas dan stabilitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Crozier, B. (1976). *The man who lost China*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Fenby, J. (2004). *Chiang Kai Shek: China's Generalissimo and the nation he lost*. New York: Carroll & Graf Publisher.
- Fenby, J. (2008). *Modern China: The fall and rise of a great power, 1850 to the present*. New York: HarperCollins Publisher.
- Furuya, K. (1981). *Chiang Kai-Shek: His life and times*. New York: St. John University.

Hsiung, S. I. (1948). *The life of Chiang Kai Shek*. London: Peter Davis.

Jen, Victoria. "Why Taiwan wants to remove its Chiang Kai Shek statues". CNA, 3 Mei 2024

Jowett, P. (2013). *China's war: Rousing the dragon, 1849–1949*. Oxford: Osprey Publishing.

Lary, D. (2007). *China's republic*. New York: Cambridge University Press.

Laver, H. S., & Matthews, J. J. (2008). *The art of command: Military leadership from George Washington to Colin Powell*. Lexington: The University Press of Kentucky.

Loh, P. P. (1971). *The early Chiang Kai-shek: A study of his personality and politics, 1887–1924*. New York: Columbia University Press.

Lukes, S. (2021). *Power: A radical view*. London: Red Globe Press.

Pantsov, A. V. (2023). *Victorious in defeat: The life and times of Chiang Kai-Shek, China, 1887–1975*. London: Yale University Press.

Powell, R. L. (1955). *The rise of Chinese military power, 1895–1912*. Princeton: Princeton University Press.

Skocpol, T. (2015). *States and social revolutions: A comparative analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.

Taylor, J. (2009). *The Generalissimo: Chiang Kai-Shek and the struggle for modern China*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

The Contested Histories Initiative, (January 2022) "Chiang Kai-shek Memorial Hall in Taiwan", Contested Histories Case Study #152, disadur dari https://contestedhistories.org/wp-content/uploads/Taiwan_-Chiang-Kai-shek-Memorial-Hall-in-Taipei-City.pdf

Yamada, T. (2017). Chiang Kai-shek's study in Japan in his memories. Dalam Laura De Giorgi & Guido Samarani (Penyunting), *Chiang Kai-shek and his time: New historical and historiographical perspectives*, (hlm. 13–36). Venezia: Edizioni Ca'Foscari.

Zarrow, P. (2005). *China in war and revolutions, 1895–1949*. New York: Routledge.